



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS PERMANA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **149816**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.183.180.000
1. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/130 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Tanah Seluas 3293 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 339.180.000		
4. Tanah Seluas 1260 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	332.500.000
1. MOBIL, FORD ESCAPE Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MATIC/ NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 246.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	433.377.958
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.958.057.958



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.958.057.958

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.